

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Al Fikry, A. H. (2022). Kerangka Penguatan Sistem Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 25(01), 11-24.
- Arief, A. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya. *Petitum*, 6(2 Oktober), 76-86.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 161-184.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123-133.
- Harianti, E., & Salmaniah, N. S. (2014). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 45-57.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154-161.
- JE, H. (2007). Kebijakan publik dan desentralisasi. *Yogyakarta: Laksbang*.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158-180.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Marpaung, Y. M. (2012).

**Dampak Implementasi Kebijakan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)**  
Avicenna Putri Hamidah, Dra. Ratnawati, S.U.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Marpaung, Y. M. (2012). Pengaruh Paparan Debu Respirable PM<sub>2,5</sub> Terhadap Kejadian

Gangguan Fungsi Paru Pedagang Tetap di Terminal Terpadu Kota Depok Tahun 2012.

*Depok: Universitas Indonesia.*

Nikmatullah, N. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus. QAWWAM, 14(2), 37-53.

Perempuan, K. (2018). Tergerusnya ruang aman perempuan dalam pusaran politik populisme. *Komisi Perlindungan dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.*

Pradita, S. M. (2020). Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19–20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa. Chronol. J. Hist. Educ, 2(2), 12-27.

Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(1), 55-61.

Purnaningsiwi, F. A., Sundarso, S., & Rengga, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Journal of Public Policy and Management Review, 3(3), 192-200.

Rehatta, V. J. (2014). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia). Sasi, 20(2), 53-63.

Setiawan, Y. B., Fanani, F., & Julianto, E. N. (2016). Bias Gender Dalam Cerita Rakyat:(Analisis Naratif pada folklore Eropa, Cinderella, dengan Cerita Rakyat Indonesia, Bawang Merah Bawang Putih). Jurnal The Messenger, 5(2), 1-13.

Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. SOSIETAS, 11(1), 940-955.

Soemarwoto, Otto, 1998. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Surakhmad. (2012). Inovasi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara

Wardhana, A., & Farina, S. (2022). Komunikasi Persuasif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam Upaya Menanggulangi

**Buku:**

Grindle, M.S. (1980). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press

Komnas Perempuan. 2021. *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19*. CaTahu 2021.

Mansour Fakih, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta. Bildung.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Sebuah Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Winarno, B. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Website:**

Setwan DPRD Kota Yogya. (2022, Mei 27). *Kebijakan pemerintah dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak* [web page]. Diakses dari <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21375> pada 11 Januari 2023

LPPM Sintesa. (2022, Maret 14). *Aksi IWD 2022 yogyakarta: bersama perempuan melawan diskriminasi, kapitalisme, dan kekerasan seksual* [web page]. Diakses dari <https://lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id/aksi-iwd-2022-yogyakarta-bersama-perempuan-melawan-diskriminasi-kapitalisme-dan-kekerasan-seksual/> pada 11 Januari 2023

Rukmana, N. I.. (2022, September 16). *DP3AP2 DIY catat ada 654 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di DI Yogyakarta* [web page]. Diakses dari



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Dampak Implementasi Kebijakan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,**

**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)**

Avicenna Putri Hamidah, Dra. Ratnawati, S.U.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://std.repository.ugm.ac.id/>

<https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta?page=all#:~:text=Khusus%20kasus%20tertinggi%20kekerasan%20kekerasan,Kabupaten%20Sleman%20sebanyak%20145%20kasus%20pada%2011%20Januari%202023>

Produk Hukum:

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender